

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

Jumlah atau besarnya penduduk umumnya dikaitkan dengan pertumbuhan *income per capita* suatu negara, yang secara kasar mencerminkan kemajuan perekonomian negara tersebut. Ada pendapat yang mengatakan bahwa jumlah penduduk yang besar adalah sangat menguntungkan bagi pembangunan ekonomi. Tetapi ada pula yang berpendapat lain yaitu bahwa justru penduduk yang jumlahnya sedikit yang dapat mempercepat proses pembangunan ekonomi ke arah yang lebih baik. Di samping kedua pendapat ini, ada pula pendapat yang mengatakan bahwa jumlah penduduk suatu negara harus seimbang dengan jumlah sumber-sumber ekonominya, baru dapat diperoleh kenaikan pendapatan nasionalnya. Ini berarti jumlah penduduk tidak boleh terlampau sedikit tetapi juga tidak boleh terlampau banyak (Mulyadi, 2014).

Salah satu masalah yang biasa muncul dalam bidang ketenagakerjaan adalah kesempatan kerja atau penyerapan tenaga kerja. Perkembangan roda perekonomian suatu daerah secara cepat mencerminkan aktivitas produksi yang tinggi. Kapasitas produksi yang tinggi membutuhkan tingginya faktor produksi, di antaranya adalah tenaga kerja. Dapat dinyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang meningkat,

akan menaikkan penyerapan tenaga kerja (Simanjuntak, 2001 dalam Rochmani dkk, 2016).

1. Tenaga Kerja

Biro pusat statistik mendefinisikan bekerja adalah melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh upah atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan. Lamanya bekerja paling sedikit satu jam secara terus menerus dalam seminggu, termasuk dalam batasan ini pekerja keluarga tanpa upah yang membantu dalam suatu usaha atau kegiatan ekonomi (Dumairy, 1999).

Ada dua teori tentang masalah ketenagakerjaan. Pertama adalah teori Lewis (1959) yang mengemukakan bahwa kelebihan pekerja merupakan kesempatan dan bukan suatu masalah. Kelebihan pekerja satu sektor akan memberikan andil terhadap pertumbuhan *output* dan penyediaan pekerja di sektor lain. Terdapat dua struktur di dalam perekonomian negara berkembang, yaitu sektor kapitalis modern dan sektor subsisten terbelakang. Sektor subsisten terbelakang mempunyai kelebihan penawaran pekerja dan tingkat upah relatif murah daripada sektor kapitalis modern. Adanya kelebihan penawaran pekerja tidak memberikan masalah pada pembangunan ekonomi. Sebaiknya kelebihan pekerja justru merupakan modal untuk mengakumulasi pendapatan, dengan asumsi bahwa perpindahan pekerja dari sektor subsisten ke sektor kapitalis modern berjalan lancar dan perpindahan tersebut tidak akan pernah menjadi “terlalu banyak”.

Teori kedua adalah teori Fei-Ranis (1961) ada tiga tahap pembangunan ekonomi dalam kondisi kelebihan buruh. Pertama, di mana para penganggur semu (yang tidak menambah *output* pertanian) dialihkan ke sektor industri dengan upah institusional yang sama. Kedua, tahap di mana pekerja pertanian menambah *output* tetapi memproduksi lebih kecil dari upah institusional yang mereka peroleh, dialihkan ke sektor industri. Ketiga, tahap ditandai awal pertumbuhan swasembada pada saat buruh pertanian menghasilkan *output* lebih besar daripada perolehan upah institusional. Kelebihan pekerja terserap ke sektor jasa dan industri yang meningkat terus menerus sejalan dengan pertambahan *output* dan perluasan usahanya (Mulyadi, 2014).

a. Pengertian Tenaga Kerja

Tenaga kerja adalah penduduk dalam usia kerja (berusia 15-64 tahun) atau jumlah seluruh penduduk dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga kerja, dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut (Mulyadi, 2014).

Secara garis besar penduduk suatu negara dibedakan menjadi dua golongan yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Yang tergolong sebagai tenaga kerja ialah penduduk yang berumur di dalam batas usia kerja. Batasan usia kerja berbeda-beda antara negara yang satu dengan negara yang lain. Batas usia kerja yang dianut oleh Indonesia ialah minimum 10 tahun, tanpa batas umur maksimum. Jadi, setiap orang atau

semua penduduk yang sudah berusia 10 tahun tergolong sebagai tenaga kerja (Dumairy, 1999).

Tenaga kerja dipilah ke dalam dua kelompok yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Yang termasuk angkatan kerja ialah tenaga kerja atau penduduk dalam usia kerja yang bekerja, atau mempunyai pekerjaan namun untuk sementara sedang tidak bekerja, dan yang mencari pekerjaan. Sedangkan yang termasuk bukan angkatan kerja ialah tenaga kerja atau penduduk dalam usia kerja yang tidak bekerja, tidak mempunyai pekerjaan dan sedang tidak mencari pekerjaan; yakni orang-orang yang kegiatannya bersekolah, mengurus rumah tangga, serta menerima pendapatan tapi bukan merupakan imbalan langsung atas jasa kerjanya (Dumairy, 1999).

Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 1, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melaksanakan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Berdasarkan UU No. 25 Tahun 2007 tentang ketenagakerjaan, ketentuan batas usia kerja penduduk Indonesia adalah 15 tahun.

Tenaga kerja atau yang disebut Penduduk Usia Kerja (PUK) terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja mencakup penduduk yang bekerja dan yang sedang mencari pekerjaan. Penduduk yang bekerja dibagi menjadi dua, yaitu penduduk yang bekerja penuh dan setengah menganggur. Bekerja adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan tujuan memperoleh nafkah atau membantu memperoleh nafkah

paling sedikit satu jam secara terus-menerus selama seminggu yang lalu. Sementara yang dimaksud dengan mencari pekerjaan adalah upaya yang dilakukan untuk memperoleh pekerjaan. Penduduk yang mencari pekerjaan dibagi menjadi penduduk yang pernah bekerja dan penduduk yang belum pernah bekerja (Badan Pusat Statistik, 2000).

Penduduk yang tidak aktif secara ekonomi digolongkan dalam kelompok bukan angkatan kerja yang terdiri dari kelompok mereka yang bersekolah, kelompok yang mengurus rumah tangga yaitu mereka yang mengurus rumah tangga tanpa memperoleh upah dan golongan lainnya. Golongan yang masih bersekolah dan yang mengurus rumah tangga sewaktu-waktu dapat masuk ke pasar kerja sehingga kelompok ini dapat juga disebut sebagai usaha yang dimiliki badan usaha dengan memiliki tenaga kerja, sedangkan sektor informal adalah usaha yang dilakukan sendiri atau dibantu orang lain dan atau pekerja bebas serta pekerja yang tak dibayar (DEPNAKERTRANS, 2007).

Menurut Swastha (2000) dalam Subekti (2007) tenaga kerja dapat dibedakan dengan fungsinya, yaitu :

a. Tenaga Kerja Eksekutif

Tenaga kerja ini mempunyai tugas dalam pengambilan keputusan dan melaksanakan fungsi organik manajemen, merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengordinir dan mengawasi.

b. Tenaga Kerja Operatif

Jenis tenaga kerja ini adalah pelaksana yang melaksanakan tugas-tugas tertentu yang dibebankan kepadanya. Tenaga kerja operatif dibagi menjadi tiga yaitu :

- a) Tenaga kerja terampil (*skilled labour*)
- b) Tenaga kerja setengah terampil (*semi skilled labour*)
- c) Tenaga kerja tidak terampil (*unskilled labour*)

b. Penyerapan Tenaga Kerja

Kesempatan kerja adalah banyaknya orang yang dapat tertampung untuk bekerja pada suatu unit usaha atau lapangan pekerjaan. Kesempatan kerja ini akan menampung semua tenaga kerja apabila unit usaha atau lapangan pekerjaan yang tersedia mencukupi atau seimbang dengan banyaknya tenaga kerja yang ada. Adapun lapangan pekerjaan adalah bidang kegiatan usaha atau instansi di mana seseorang bekerja atau pernah bekerja (BPS, 2003).

Penyerapan tenaga kerja dapat diartikan sebagai kemampuan lapangan kerja dalam menyerap tenaga kerja yang memenuhi kriteria pada lapangan kerja tersebut. Jumlah penyerapan tenaga kerja dapat sama atau bahkan lebih kecil jumlah kesempatan kerja yang tersedia. Apabila jumlah kesempatan kerja sama dengan jumlah penyerapan kerja maka tidak akan terjadi pengangguran. Namun, apabila jumlah penyerapan tenaga kerja lebih kecil dari jumlah kesempatan kerja maka akan terjadi pengangguran (Feriyanto, 2014).

Teori permintaan menerangkan tentang ciri hubungan antara jumlah permintaan dengan harga. Sehubungan dengan tenaga kerja, permintaan tenaga kerja berarti hubungan antara tingkat upah dengan kuantitas tenaga kerja yang dikehendaki untuk dipekerjakan. Permintaan pengusaha atas tenaga kerja berlainan dengan permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa. Masyarakat membeli barang dan jasa karena barang dan jasa tersebut memberikan kepuasan kepadanya. Sementara pengusaha mempekerjakan seseorang karena orang tersebut membantu memproduksi barang dan jasa untuk dijual kepada masyarakat. Dengan kata lain, pertambahan permintaan terhadap tenaga kerja bergantung pertambahan permintaan masyarakat akan barang dan jasa yang diproduksi. Permintaan tenaga kerja yang seperti itu dinamakan *derived demand* (Simanjuntak, 1985 dalam Roni, 2010).

Pengusaha mempekerjakan seseorang karena membantu memproduksi barang dan jasa untuk dijual kepada masyarakat. Oleh karena itu, kenaikan permintaan pengusaha terhadap tenaga kerja, tergantung dari kenaikan permintaan masyarakat akan barang yang diproduksi. Di dalam menganalisis mengenai permintaan perlu disadari perbedaan diantara istilah “permintaan” dan “jumlah barang yang diminta”. permintaan adalah keseluruhan hubungan antara berbagai tingkat upah dan jumlah permintaan. Sedangkan jumlah yang diminta berarti banyaknya permintaan pada suatu tingkat harga tertentu (Simanjuntak, 1985 dalam Roni, 2010).

Permintaan tenaga kerja berkaitan dengan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan oleh suatu unit usaha. Permintaan tenaga kerja dipengaruhi perubahan tingkat upah dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi permintaan hasil produksi, yaitu permintaan pasar akan hasil produksi dari suatu unit usaha, yang tercermin dari besarnya volume produksi dan harga barang-barang modal seperti mesin atau alat proses produksi (Sudarsono, 1988 dalam Subekti, 2007).

Mengacu pada uraian di atas, maka diperoleh kesimpulan adanya perbedaan antara permintaan tenaga kerja dan jumlah tenaga kerja yang diminta atau dalam hal ini tenaga kerja yang diserap oleh sektor usaha tertentu di suatu wilayah. Permintaan tenaga kerja adalah keseluruhan hubungan antara berbagai tingkat upah dan jumlah tenaga kerja yang diminta untuk dipekerjakan. Sedangkan jumlah tenaga kerja yang diminta lebih ditujukan pada kuantitas dan banyaknya permintaan tenaga kerja pada tingkat upah tertentu (Roni, 2010).

Penyerapan tenaga kerja didefinisikan sebagai jumlah tenaga kerja yang terserap pada suatu sektor dalam waktu tertentu. Penyerapan tenaga kerja diturunkan dari fungsi produksi suatu aktivitas ekonomi. Produksi merupakan transformasi dari input atau masukan (faktor produksi) ke dalam output atau keluaran. Jika diasumsikan bahwa suatu proses produksi hanya menggunakan dua jenis faktor produksi yaitu tenaga kerja (L) dan modal (K), maka produksinya adalah :

$$Q_t = f(L_t, K_t) \dots\dots\dots(2.1)$$

Sedangkan persamaan keuntungan yang diperoleh suatu perusahaan menurut model Neoklasik adalah :

$$\pi_t = TR - TC \dots\dots\dots(2.2)$$

Di mana :

$$TR = p_t \cdot Q_t \dots\dots\dots(2.3)$$

Dalam menganalisis penentuan penyerapan tenaga kerja, diasumsikan bahwa hanya ada dua input yang digunakan, yaitu modal (K) dan tenaga kerja (L). Tenaga kerja (L) diukur dengan tingkat upah yang diberikan kepada pekerja (W) sedangkan untuk modal (K) diukur dengan tingkat suku bunga (r).

$$TC = r_t K_t + W_t L_t \dots\dots\dots(2.4)$$

Dengan mensubstitusi persamaan (1), (3), (4) ke persamaan (2) maka diperoleh :

$$W_t L_t = p_t \cdot f(L_t, K_t) - r_t K_t - \pi_t \dots\dots\dots(2.5)$$

$$L_t = [p_t \cdot f(L_t, K_t)] / W_t - r_t K_t / W_t - \pi_t / W_t \dots\dots\dots(2.6)$$

Di mana :

L_t = permintaan tenaga kerja

W_t = upah tenaga

P_t = harga jual barang per unit

K_t = kapital (investasi)

r_t = tingkat suku bunga

Q_t = output (PDRB)

Semua variabel di atas diukur pada waktu tertentu. Berdasarkan persamaan di atas dapat diketahui bahwa permintaan tenaga kerja (L_t) merupakan fungsi dari tingkat upah (W). Hukum permintaan tenaga kerja pada hakekatnya adalah semakin rendah upah tenaga kerja maka semakin banyak permintaan tenaga kerja tersebut. Apabila upah yang diminta besar, maka pengusaha akan mencari tenaga kerja lain yang upahnya lebih rendah dari yang pertama. Hal ini karena dipengaruhi oleh banyak faktor, yang di antaranya adalah besarnya jumlah angkatan kerja yang masuk ke dalam pasar tenaga kerja, upah dan *skill* yang dimiliki oleh tenaga kerja tersebut (Roni, 2010).

c. Teori Permintaan Tenaga Kerja

Teori permintaan tenaga kerja adalah teori yang menjelaskan seberapa banyak suatu lapangan usaha akan mempekerjakan tenaga kerja dengan berbagai tingkat upah pada suatu periode tertentu. Permintaan pengusaha atas tenaga kerja berlainan dengan permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa. Masyarakat membeli barang karena barang tersebut memberikan kegunaan kepada konsumen. Akan tetapi bagi pengusaha mempekerjakan seseorang bertujuan untuk membantu memproduksi barang dan jasa untuk dijual kepada masyarakat. Dengan kata lain, penambahan permintaan pengusaha terhadap tenaga kerja tergantung dari penambahan permintaan masyarakat terhadap barang yang diproduksinya. Oleh karena itu, permintaan akan tenaga kerja merupakan permintaan turunan (Roni, 2010).

Fungsi permintaan tenaga kerja biasanya didasarkan pada teori ekonomi neoklasik, di mana dalam ekonomi pasar diasumsikan bahwa pengusaha tidak dapat mempengaruhi harga pasar (*price taker*). Pada saat memaksimalkan laba, pengusaha hanya dapat mengatur berapa jumlah tenaga kerja yang dapat dipekerjakan. Fungsi permintaan tenaga kerja didasarkan pada :

a. Tambahan hasil marjinal

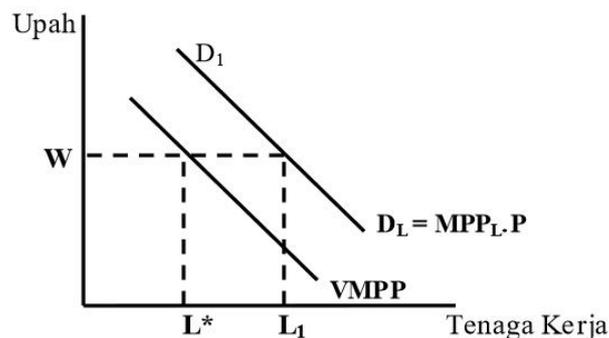
Merupakan tambahan hasil yang diperoleh dengan penambahan seorang pekerja atau istilah lainnya disebut *Marginal Physical Product* dari tenaga kerja (MPP_1).

b. Penerimaan marjinal

Merupakan jumlah uang yang akan diperoleh pengusaha dengan tambahan hasil marjinal tersebut atau istilah lainnya disebut *Marginal Revenue* (MR). Penerimaan marjinal di sini merupakan besarnya tambahan hasil marjinal dikalikan dengan harga per unit, sehingga $MR = VMPP_L = MPP_L \cdot P$

c. Biaya marjinal

Merupakan jumlah biaya yang dikeluarkan pengusaha dengan mempekerjakan tambahan seorang pekerja, dengan kata lain upah karyawan tersebut. Apabila tambahan penerimaan marjinal lebih besar dari biaya marjinal, maka mempekerjakan orang tersebut akan menambah keuntungan pemberi kerja, sehingga ia akan terus menambah jumlah pekerja selama MR lebih besar dari tingkat upah.



Sumber : Bellante dan Jackson (1990) dalam Roni (2010)

GAMBAR 2.1.

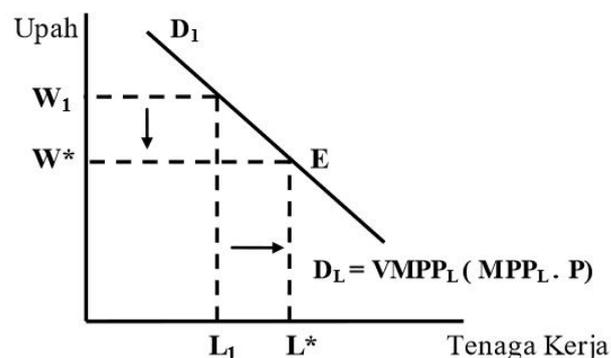
Kurva Permintaan Tenaga Kerja dengan Tingkat Upah Tetap

Berdasarkan gambar diatas, *Value Marginal Physical Product of Labor* atau VMPP adalah nilai pertambahan hasil marjinal dari tenaga kerja. P adalah harga jual barang per unit, D_L adalah permintaan tenaga kerja, W adalah tingkat upah, dan L adalah jumlah tenaga kerja. Peningkatan permintaan terhadap tenaga kerja tergantung dari pertambahan permintaan masyarakat terhadap barang yang dikonsumsi. Semakin tinggi permintaan masyarakat akan barang tertentu, maka jumlah tenaga kerja yang diminta suatu lapangan usaha akan semakin meningkat dengan asumsi tingkat upah tetap (Bellante dkk, 1990 dalam Roni, 2010).

Peningkatan jumlah tenaga kerja dalam suatu lapangan usaha tidak dilakukan untuk jangka pendek, walaupun permintaan masyarakat terhadap produk yang dihasilkan tinggi. Dalam jangka pendek, pengusaha lebih mengoptimalkan jumlah tenaga kerja yang ada dengan penambahan jam kerja atau penggunaan mekanisasi, sedangkan dalam jangka panjang kenaikan jumlah permintaan masyarakat akan direspon dengan menambah

jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan. Hal ini berarti terjadi peningkatan penyerapan tenaga kerja baru (Bellante dkk, 1990 dalam Roni, 2010).

Pengusaha akan melakukan penyesuaian penggunaan tenaga kerja tergantung dari tingkat upahnya. Jika tingkat upah mengalami penurunan, maka pengusaha akan meningkatkan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Penawaran tingkat upah dapat dilihat pada Gambar 2.2. kurva D_L melukiskan besarnya nilai hasil marginal tenaga kerja ($VMPP_L$) untuk setiap penggunaan tenaga kerja. Dengan kata lain, menggambarkan hubungan antara tingkat upah (W) dan penggunaan tenaga kerja yang ditunjukkan oleh titik L_1 dan L^* . Pada Gambar 2.2 terlihat bahwa pada kondisi awal tingkat upah berada pada W_1 dan jumlah tenaga kerja yang digunakan L_1 . Jika tingkat upah diturunkan menjadi W^* , maka tenaga kerja yang diminta meningkat menjadi L^* (Bellante dkk, 1990 dalam Roni, 2010).



Sumber : Bellante dan Jackson (1990) dalam Roni (2010)

GAMBAR 2.2.

Kurva Permintaan Tenaga Kerja dengan Tingkat Upah Minimum

2. Angkatan Kerja

Angkatan kerja adalah bagian dari tenaga kerja yang sesungguhnya terlibat, atau berusaha untuk terlibat, dalam kegiatan produktif, yaitu produksi barang dan jasa. Jumlah penduduk yang semakin besar telah membawa akibat jumlah angkatan kerja yang semakin besar pula. Ini berarti semakin besar pula jumlah orang yang mencari pekerjaan atau menganggur. Supaya dapat dicapai keadaan yang seimbang maka seharusnya mereka semua dapat tertampung dalam suatu pekerjaan yang cocok dan sesuai dengan keinginan serta keterampilan mereka. Ini akan membawa konsekuensi bahwa perekonomian harus selalu menyediakan lapangan-lapangan pekerjaan yang cocok dan sesuai dengan keinginan serta keterampilan mereka. Jadi perekonomian harus selalu menyediakan lapangan-lapangan pekerjaan bagi angkatan kerja baru (Mulyadi S., 2014).

Angkatan kerja ialah tenaga kerja atau penduduk dalam usia kerja yang bekerja, atau mempunyai pekerjaan namun untuk sementara tidak sedang bekerja, dan yang mencari pekerjaan. Konsep pemilah-milahan penduduk antara tenaga kerja (berusia ≥ 10 tahun) dan bukan tenaga kerja (berusia < 10 tahun) disebut pendekatan angkatan kerja (*labour force approach*), diperkenalkan oleh *International Labour Organization* (ILO). Banyak negara berkembang menerapkan pendekatan ini. Biro pusat statistik juga menerapkannya untuk memetakan dan menganalisis ketenagakerjaan di tanah air. Alternatif bagi pendekatan ini adalah pendekatan pemanfaatan tenaga kerja. Perbedaannya pendekatan pertama hanya sekedar

membedakan angkatan kerja atas bekerja dan menganggur, tidak menguraikan pekerja secara lebih terinci berdasarkan pemanfaatan tenaganya seperti pendekatan yang kedua (Dumairy, 1999).

Salah satu masalah yang biasa muncul dalam bidang angkatan kerja adalah ketidakseimbangan antara permintaan akan tenaga kerja (*demand for labor*) dan penawaran tenaga kerja (*supply of labor*), pada suatu tingkat upah (Kusumosuwidho, 1981 dalam Mulyadi S., 2014).

Ketidakseimbangan tersebut dapat berupa:

- a. Lebih besarnya penawaran dibanding permintaan terhadap tenaga kerja (adanya *excess supply of labor*).
- b. Lebih besarnya permintaan dibanding penawaran tenaga kerja (adanya *excess demand for labor*).

Angkatan kerja (*labor force*) adalah bagian penduduk yang mampu dan bersedia melakukan pekerjaan. Adapun pengertian angkatan kerja dalam hal ini “mampu” berarti mampu secara fisik, jasmani, kemampuan mental dan juga secara yuridis mampu serta tidak kehilangan kebebasan untuk memilih dan juga melakukan pekerjaan yang dilakukan serta bersedia secara aktif maupun juga pasif dalam melakukan dan mencari pekerjaan (Sumarsono, 2009).

Menurut Dumairy (1999) jenis-jenis angkatan kerja dapat dibedakan ke dalam dua jenis kelompok, yaitu :

a. Pekerja

Yang dimaksud dengan pekerja adalah orang-orang yang mempunyai pekerjaan, mencakup orang yang mempunyai pekerjaan dan (ketika disensus atau disurvei) memang sedang bekerja, serta orang yang mempunyai pekerjaan namun untuk sementara waktu sedang tidak bekerja.

b. Pengangguran

Pengangguran ialah orang yang tidak mempunyai pekerjaan, atau orang yang tidak bekerja dan (masih atau sedang) mencari pekerjaan (Dumairy, 1999). Menurut Mulyadi S. (1999) macam-macam pengangguran dapat digolongkan ke dalam tujuh jenis, yaitu :

a) Pengangguran Terbuka (*open unemployment*)

Merupakan bagian dari angkatan kerja yang sekarang ini tidak bekerja dan sedang aktif mencari pekerjaan.

b) Setengah menganggur (*underemployment*)

Merupakan perbedaan antara jumlah pekerjaan yang benar dikerjakan seseorang dalam pekerjaannya dengan jumlah pekerjaan yang secara normal mampu dan ingin dikerjakannya.

c) Setengah Menganggur yang Ketara (*visible underemployment*)

Merupakan jika seseorang bekerja tidak tetap di luar keinginannya sendiri, atau bekerja dalam waktu yang lebih pendek dari biasanya.

d) Setengah Menganggur yang Tidak Kentara (*invisible underemployment*).

Merupakan jika seseorang bekerja secara penuh tetapi pekerjaannya itu dianggap tidak mencukupi, karena pendapatannya yang terlalu rendah atau pekerjaan tersebut tidak memungkinkan ia untuk mengembangkan seluruh keahliannya.

e) Pengangguran Tidak Kentara (*disguised unemployment*)

Merupakan dalam angkatan kerja mereka dimasukkan dalam kegiatan bekerja, tetapi sebetulnya mereka adalah penganggur jika dilihat dari segi produktivitasnya.

f) Pengangguran Friksional (*unemployment frictional*)

Merupakan penganggurn yang terjadi akibat pindahnya seseorang dari suatu pekerjaan ke pekerjaan yang lain, dan akibatnya harus mempunyai tenggang waktu dan berstatus sebagai penganggur sebelum mendapatkan pekerjaan yang lain tersebut.

g) Pengangguran Struktural (*unemployment structural*)

Merupakan pengangguran yang disebabkan karena ketidakcocokan antara struktur para pencari kerja, sehubungan dengan keterampilan, bidang keahlian, maupun daerah lokasinya dengan struktur permintaan tenaga kerja yang belum terisi.

3. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan *output* perkapita dalam jangka panjang. Tekanannya pada tiga aspek, yaitu: proses, *output* perkapita dan jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses, bukan suatu gambaran ekonomi pada suatu saat. Aspek dinamis dari suatu

perekonomian, yaitu bagaimana suatu perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu. Tekanannya ada pada perubahan atau perkembangan itu sendiri (Boediono, 1999).

Pembangunan ekonomi sangat diperlukan untuk memperkecil tingkat pengangguran. Dengan pembangunan ekonomi diharapkan laju pertumbuhan ekonomi dapat selalu dipertahankan pada tingkat yang lebih tinggi dari tingkat pertumbuhan penduduk, sehingga kegiatan perekonomian akan menjadi lebih luas dan selanjutnya dapat memperkecil jumlah pengangguran (Mulyadi S., 2014).

Menurut Prof. Simon Kuznets, pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas tersebut dimungkinkan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian-penyesuaian teknologi, institusional dan ideologi terhadap berbagai keadaan yang ada (Todaro, 2000).

Secara umum teori pertumbuhan ekonomi menurut para ahli dapat dibagi menjadi dua, yaitu: teori pertumbuhan ekonomi historis dan teori pertumbuhan ekonomi klasik dan neoklasik (*academia.edu*).

a. Teori Pertumbuhan Ekonomi Historis

Aliran historis berkembang di Jerman dan kemunculannya merupakan reaksi terhadap pandangan kaum klasik yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dipercepat dengan revolusi industri, sedangkan aliran historis menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi

dilakukan secara bertahap. Pelopor aliran historis antara lain: Frederich List, Karl Bucher, Bruno Hildebrand, Wegner Sombart, dan W.W. Rostow.

b. Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik dan Neoklasik

a) Teori pertumbuhan ekonomi menurut Adam Smith

“An inquiry into the nature and causes of the wealth of the nation”, teorinya yang dibuat dengan teori *the invisible hands* (Teori tangan-tangan gaib).

Teori pertumbuhan ekonomi Adam Smith ditandai oleh dua faktor yang saling berkaitan:

1. Pertumbuhan penduduk
2. Pertumbuhan output total

Pertumbuhan output yang akan dicapai dipengaruhi oleh 3 komponen berikut ini:

1. Sumber-sumber alam
2. Tenaga kerja (pertumbuhan penduduk)
3. Jumlah persediaan

b) Teori pertumbuhan ekonomi David Ricardo dan T.R Malthus

Menurut David Ricardo faktor pertumbuhan penduduk yang semakin besar hingga menjadi dua kali lipat pada suatu saat akan menyebabkan jumlah tenaga kerja melimpah. Pendapat Ricardo ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Thomas Robert Malthus, menyatakan bahwa makanan (hasil produksi) akan bertambah menurut deret hitung (satu, dua,

dan seterusnya). Sedangkan penduduk akan bertambah menurut deret ukur (satu, dua, empat, delapan, enam belas, dan seterusnya) sehingga pada saat perekonomian akan berada pada taraf subisten atau kemandegan.

c) Teori pertumbuhan ekonomi Robert Sollow

Robert Sollow lahir pada tahun 1916 di Brooklyn, ia seorang peraih nobel di bidang ilmu ekonomi pada tahun 1987. Robert Sollow menekankan perhatiannya pada pertumbuhan *output* yang akan terjadi atas hasil kerja dua faktor input utama, yaitu modal dan tenaga kerja.

d) Teori pertumbuhan ekonomi Harrod dan Domar

RF. Harrod dan Evsey Domar tahun 1947 pertumbuhan ekonomi menurut Harrod dan Domar akan terjadi apabila ada peningkatan produktivitas modal (MEC) dan produktivitas tenaga kerja.

4. Teori Upah

Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan pasal 1 ayat (1), upah didefinisikan sebagai hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan (Hartanto, 2017).

Upah dan pembentukan harga upah tenaga kerja akan dikemukakan beberapa teori yang menerangkan tentang latar belakang terbentuknya

harga upah tenaga kerja. Teori upah wajar (alami) dari David Ricardo, tingkat upah sebagai balas jasa bagi tenaga kerja merupakan harga yang diperlukan untuk mempertahankan dan melanjutkan kehidupan tenaga kerja. Ricardo juga menyatakan bahwa perbaikan upah hanya ditentukan oleh perbuatan dan perilaku tenaga kerja sendiri dan pembentukan upah sebaiknya diserahkan kepada persaingan bebas di pasar. Teori ini menerangkan upah menurut kodrat upah adalah yang cukup untuk pemeliharaan hidup pekerja dengan keluarganya. Di pasar akan terdapat upah menurut harga pasar adalah upah yang terjadi di pasar dan ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Upah harga pasar akan berubah disekitar upah menurut kodrat. Oleh para ahli ekonomi modern, upah kodrat dijadikan batas minimum dari upah kerja (Yulia, 2015).

Teori upah yang dikemukakan oleh Ferdinand Lassalle. Penerapan sistem upah kodrat menimbulkan tekanan terhadap kaum buruh, karena kita diketahui posisi kaum buruh dalam posisi yang sulit untuk menembus kebijakan upah yang telah diterapkan oleh para produsen. Berhubungan dengan kondisi tersebut maka teori ini dikenal dengan istilah “Teori Upah Besi”. Untuk itulah Lassalle menganjurkan untuk menghadapi kebijakan para produsen terhadap upah agar dibentuk serikat pekerja (Yulia, 2015).

Menurut Sumarsono (2003) dalam Subekti (2007), tingkat upah akan mempengaruhi tingkat biaya produksi. Apabila digunakan asumsi bahwa tingkat upah naik, maka akan terjadi hal-hal sebagai berikut :

a. Naiknya tingkat upah akan meningkatkan biaya produksi yang selanjutnya meningkatkan harga per unit barang yang diproduksi. Biasanya konsumen akan merespon cepat apabila terjadi kenaikan harga barang, yaitu mengurangi konsumsi atau bahkan tidak lagi membeli barang yang bersangkutan. Akibatnya banyak barang yang tidak terjual dan terpaksa produsen menurunkan jumlah produksinya. Turunnya target produksi mengakibatkan berkurangnya tenaga kerja yang dibutuhkan. Turunnya jumlah kebutuhan tenaga kerja karena turunnya skala produksi disebut efek skala produksi atau *scale effect*.

b. Apabila upah naik (asumsi harga barang-barang modal lainnya tidak berubah), maka pengusaha ada yang lebih suka menggunakan teknologi padat modal untuk produksinya dan mengganti kebutuhan tenaga kerja dengan barang-barang modal seperti mesin dan lainnya. Turunnya jumlah kebutuhan tenaga kerja karena penggantian atau penambahan mesin-mesin disebut efek substitusi tenaga kerja atau *substitution effect*.

Malthus merupakan salah satu seorang tokoh klasik yang meninjau upah dalam kaitannya dengan perubahan penduduk. Menurut Malthus, jumlah penduduk merupakan faktor strategis yang dipakai untuk menjelaskan berbagai hal. Malthus menyatakan bila penduduk bertambah, penawaran tenaga kerja juga bertambah sehingga dapat menekan tingkat upah. Demikian juga sebaliknya, tingkat upah akan meningkat jika penawaran tenaga kerja berkurang akibat jumlah penduduk yang menurun. Hubungan upah dengan penyerapan tenaga kerja memiliki dua sisi yaitu

upah dapat menurunkan penyerapan tenaga kerja dan kenaikan upah juga dapat menaikkan penyerapan tenaga kerja (Yulia, 2015).

Hubungan antara upah dan penyerapan tenaga kerja dapat digambarkan bahwa semakin tinggi tingkat upah akan berdampak pada meningkatnya biaya produksi, dan akibat selanjutnya perusahaan akan melakukan efisiensi dengan mengurangi tenaga kerja yang dipekerjakan (Simanjuntak, 2001 dalam Rochmani dkk, 2016).

Berdasarkan peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-01/MEN/1999 tentang keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-226/MEN/2000, upah minimum kabupaten/kota (UMK) adalah upah minimum yang berlaku di daerah kabupaten/kota. Besarnya upah minimum untuk setiap kabupaten/kota tidak sama karena tergantung nilai kebutuhan hidup minimum di daerah bersangkutan. Pada prinsipnya sistem pendapatan upah umum dilakukan untuk mengurangi eksploitasi terhadap buruh/pekerja. Penetapan upah minimum kabupaten merupakan kewajiban pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap buruh (Sari, 2015).

5. Inflasi

Inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga yang meningkat secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak disebut inflasi, kecuali apabila kenaikan tersebut meluas kepada sebagian besar dari harga barang-barang lain. Terdapat tiga komponen

yang harus dipenuhi agar dapat dikatakan inflasi, yaitu: kenaikan harga, bersifat umum, dan berlangsung terus menerus (Boediono, 1999).

Menurut Irving Fisher, kenaikan harga-harga umum atau inflasi disebabkan oleh tiga faktor yaitu jumlah uang beredar, kecepatan peredaran uang, dan jumlah barang yang diperdagangkan. Menurutnya inflasi adalah proses kenaikan harga barang umum yang berlaku dalam perekonomian, ini tidak berarti bahwa harga-harga berbagai macam barang itu naik dengan presentase yang sama, yang terpenting terdapat kenaikan harga-harga umum barang secara terus menerus selama satu periode tertentu. Kenaikan yang terjadi hanya satu sekali saja meskipun dengan presentase yang cukup besar bukanlah merupakan inflasi (Sukirno, 2002).

Inflasi terbagi menjadi dua bagian, yaitu inflasi tarikan permintaan (*demand pull inflation*) dan dorongan penawaran (*cost push inflation*). Inflasi tarikan permintaan merupakan inflasi yang disebabkan adanya permintaan barang dan jasa oleh masyarakat yang terus meningkat dengan tajam sehingga mengakibatkan tingkat harga secara umum naik. Sedangkan inflasi dorongan penawaran merupakan inflasi yang disebabkan adanya peningkatan biaya produksi dengan ditunjukkan ciri-ciri peningkatan harga barang dan turunnya produksi (Prawoto, 2019).

Veneris dan Nanaga (2001), mendefinisikan inflasi sebagai suatu kecenderungan meningkatnya tingkat harga umum secara terus menerus sepanjang waktu. Berdasarkan definisi tersebut, kenaikan tingkat harga umum yang terjadi sekali waktu saja, tidaklah dapat dikatakan sebagai

inflasi. Dari definisi tersebut ada tiga hal penting yang ditekankan dari inflasi, yaitu :

- a. Adanya kecenderungan harga-harga untuk meningkat, yang berarti bisa saja tingkat harga yang terjadi pada waktu tertentu turun atau naik dibandingkan dengan sebelumnya, tetapi tetap menunjukkan tendensi yang meningkat.
- b. Kenaikan tingkat harga tersebut berlangsung secara terus menerus, yang berarti bukan hanya terjadi pada satu waktu saja, akan tetapi bisa beberapa waktu lamanya.
- c. Tingkat harga yang dimaksud adalah tingkat harga umum, yang berarti tingkat harga yang mengalami kenaikan itu bukan hanya pada satu atau beberapa komoditi saja, akan tetapi untuk harga secara umum.

Ada berbagai cara untuk menggolongkan macam inflasi, yang pertama didasarkan atas besar tidaknya inflasi tersebut. Inflasi dapat dibagi menjadi lima macam, yaitu :

- a. Inflasi ringan (di bawah 10% setahun)
- b. Inflasi sedang (antara 10-30% setahun)
- c. Inflasi berat (antara 30-200% setahun)
- d. Hiperinflasi (di atas 100% setahun)

Selain itu, inflasi dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu :

- a. Inflasi yang timbul karena permintaan masyarakat akan berbagai barang terlalu kuat.

Inflasi semacam ini disebut *demand pull inflation*. Inflasi ini terjadi karena permintaan masyarakat akan barang-barang bertambah. Akibatnya tingkat harga umum naik. Faktor penyebab terjadi *demand pull inflation* adalah tingginya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaan barang dan jasa tersebut. Sehingga output riil yang melebihi output potensialnya atau permintaan total lebih besar dari pada kapasitas perekonomian. Sementara itu, faktor ekspektasi inflasi dipengaruhi oleh perilaku masyarakat dan pelaku ekonomi apakah lebih cenderung bersifat adaptif. Hal ini tercermin dari perilaku pembentukan harga di tingkat produsen dan pedagang terutama pada saat menjelang hari-hari besar keagamaan dan penentuan upah minimum regional.

b. Inflasi yang timbul karena kenaikan biaya produksi.

Inflasi semacam ini disebut *cost push inflation*. Faktor-faktor terjadinya *cost push inflation* disebabkan oleh depresiasi nilai tukar, dampak inflasi luar negeri terutama negara-negara dagang, peningkatan harga-harga komoditi yang diatur pemerintah, dan terjadi *negative supply shocks* akibat bencana alam dan terganggunya distribusi.

Perbedaan yang lain dari kedua proses inflasi ini terletak pada urutan kenaikan harga. Dalam *demand pull inflation* kenaikan harga barang akhir mendahului kenaikan harga barang-barang input dan harga-harga faktor produksi. Sebaliknya dalam *cost push inflation* kenaikan harga barang-barang input dan harga-harga faktor produksi mendahului kenaikan harga barang-barang aktif (*output*).

Adanya peningkatan inflasi, akan memberikan berbagai dampak terhadap pembangunan ekonomi. Adapun dampak inflasi terhadap perekonomian antara lain :

a. Efek terhadap pendapatan

Efek pendapatan sifatnya tidak merata, ada yang dirugikan dan ada pula yang diuntungkan dengan adanya inflasi. Golongan yang dirugikan adalah orang-orang yang berpenghasilan tetap, seperti pegawai negeri atau pegawai swasta karena mereka menderita kerugian penurunan pendapatan riil dan pihak-pihak yang mendapat keuntungan adalah mereka yang mempunyai kekayaan bukan uang dimana nilainya naik dengan presentase yang lebih besar dari laju inflasi.

b. Efek terhadap efisiensi

Inflasi dapat juga mengubah pola alokasi faktor-faktor produksi. Perubahan ini dapat terjadi melalui kenaikan akan berbagai macam barang yang kemudian dapat mendorong terjadinya perubahan terhadap produksi beberapa barang tertentu dengan adanya inflasi, permintaan akan barang tertentu mengalami kenaikan yang lebih besar dari barang lain, yang kemudian mendorong kenaikan produksi barang tersebut. Kenaikan produksi barang ini pada gilirannya akan mengubah pola alokasi faktor-faktor produksi yang sudah ada. Memang tidak ada jaminan bahwa alokasi faktor-faktor produksi itu lebih efisien dalam keadaan tidak ada inflasi. Namun kebanyakan ahli ekonomi berpendapat

bahwa inflasi dapat mengakibatkan alokasi produksi menjadi tidak efisien.

c. Efek terhadap *output*

Inflasi akan dapat menyebabkan terjadinya kenaikan produksi dikarenakan dalam keadaan inflasi, kenaikan harga mendahului kenaikan upah sehingga keuntungan pengusaha naik. Kenaikan keuntungan ini akan mendorong kenaikan produksi. Akan tetapi apabila laju inflasi cukup tinggi dapat mengakibatkan keadaan yang sebaliknya, yakni penurunan *output*.

d. Efek terhadap perdagangan luar negeri

Inflasi menyebabkan harga barang impor lebih murah daripada harga barang yang dihasilkan di dalam negeri dan kenaikan harga-harga akan menyebabkan barang-barang produksi dalam negeri tidak dapat bersaing dengan barang-barang yang sama di pasaran luar negeri.

e. Efek terhadap kesempatan kerja

Inflasi dapat mengakibatkan terjadinya aliran modal keluar dibandingkan aliran modal yang masuk sehingga terjadi penurunan investasi baik dari sisi swasta ataupun pemerintah. Keadaan tersebut akan mengakibatkan pada semakin tingginya angka pengangguran.

6. Produk Domestik Regional Bruto

Produk domestik regional bruto merupakan nilai total atas segenap output akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian di tingkat daerah,

baik itu yang dilakukan oleh penduduk daerah maupun penduduk dari daerah lain yang bermukim di daerah tersebut (Todaro, 2002).

Produk domestik regional bruto (PDRB) merupakan jumlah nilai tambah bruto (*gross value added*) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian yang terdapat di suatu wilayah. Nilai tambah adalah nilai yang ditambahkan dari kombinasi faktor produksi dan bahan baku dalam proses produksi (BPS, 2012).

Menurut Todaro (2002), angka PDRB sangat diperlukan dan perlu disajikan, karena selain dapat dipakai sebagai bahan analisa perencanaan pembangunan juga merupakan barometer untuk mengukur hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan. Metode-metode perhitungan PDRB yaitu:

a. Metode Langsung

Metode perhitungan langsung terbagi menjadi tiga, yang pertama adalah pendekatan produksi, dengan pendekatan produksi produk nasional atau produk domestik bruto diperoleh dengan menjumlahkan nilai pasar dari seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor dalam perekonomian. Dengan demikian, GDP menurut pendekatan produksi ini adalah penjumlahan dari masing-masing barang dan jasa dengan jumlah atau kuantitas barang dan jasa yang dihasilkan. Yang kedua adalah pendekatan pendapatan, pendekatan pendapatan ini adalah suatu pendekatan dimana pendapatan nasional diperoleh dengan cara menjumlahkan pendapatan dari berbagai faktor produksi yang

menyumbang terhadap proses produksi. Kemudian yang terakhir adalah pendekatan pengeluaran, yang merupakan pendekatan pendapatan nasional atau produk domestik regional bruto diperoleh dengan cara menjumlahkan nilai pasar dari seluruh permintaan akhir atas *output* yang dihasilkan dalam perekonomian, diukur pada harga pasar yang berlaku.

b) Metode Tidak Langsung

Menghitung nilai tambah suatu kelompok ekonomi dengan mengalokasikan nilai tambah kedalam masing-masing kelompok kegiatan ekonomi pada tingkat regional sebagai alokator digunakan yang paling besar tergantung atau erat kaitannya dengan produktifitas kegiatan ekonomi tersebut melalui PDRB menurut harga berlaku dan harga konstan. Pendapatan regional suatu provinsi dapat diukur untuk menghitung kenaikan tingkat pendapatan masyarakat. Kenaikan ini dapat disebabkan oleh dua faktor, yaitu:

- a) Kenaikan pendapatan yang benar-benar bisa menaikkan daya beli penduduk.
- b) Kenaikan pendapatan yang disebabkan oleh inflasi, kenaikan pendapatan yang disebabkan karena kenaikan harga pasar tidak menaikkan daya beli penduduk dan kenaikan seperti ini merupakan kenaikan pendapatan yang tidak riil.

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu mengenai penyerapan tenaga kerja telah banyak dilakukan oleh peneliti. Tanti Siti Rochmani dan Yunastiti Purwaningsih (2016) meneliti tentang analisis penyerapan tenaga kerja sektor industri di Provinsi Jawa Tengah periode tahun 2010-2014. Penelitian ini menggunakan metode regresi data panel. Berdasarkan penelitian tersebut, menunjukkan bahwa variabel laju pertumbuhan ekonomi, upah minimum Kabupaten/Kota dan jumlah unit usaha industri berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Tengah. Secara parsial laju pertumbuhan ekonomi dan upah minimum Kabupaten/Kota berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri, sedangkan jumlah unit usaha industri tidak berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja.

Dian Novianti Sitompul (2014) meneliti tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja sektor industri di Sumatera Utara periode tahun 1994-2010. Penelitian ini menggunakan metode *ordinary least square* (OLS). Berdasarkan penelitian tersebut, menunjukkan bahwa variabel PDRB, inflasi, jumlah industri, dan UMR berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri di Sumatera Utara. Secara parsial PDRB dan inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri, sedangkan jumlah dan UMR berpengaruh signifikan. Variabel yang paling dominan berpengaruh adalah jumlah industri.

Fauzul Halim ZI, Abubakar Hamzah dan Sofyan (2015) meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja usaha tani

sawah di Provinsi Aceh periode tahun 2000-2013. Penelitian ini menggunakan metode regresi linier berganda. Berdasarkan penelitian tersebut, menunjukkan bahwa angkatan kerja, PDRB sub sektor tanaman pangan, luas lahan sawah, nilai tukar petani dan UMP berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja pada usaha tani sawah di Provinsi Aceh. Penyerapan tenaga kerja usaha tani sawah di Provinsi Aceh dipengaruhi oleh angkatan kerja, PDRB sektor tanaman pangan, luas lahan sawah, nilai tukar petani dan UMP.

Tri Kartika Sari (2017) meneliti tentang determinan penyerapan tenaga kerja di Indonesia periode tahun 2007-2016. Penelitian ini menggunakan metode regresi panel data dengan estimasi *Fixed Effect* pada taraf nyata 5 persen. Berdasarkan penelitian tersebut, menunjukkan bahwa UMP berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia, IPM berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia, sedangkan angkatan kerja dan PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia.

Stephen Bazen (2007) meneliti tentang apakah upah minimum memiliki dampak negatif terhadap pekerja di Amerika Serikat. Penelitian ini menggunakan metode kuasi-eksperimental data panel. Berdasarkan penelitian tersebut, menunjukkan bahwa Amerika Serikat tidak memiliki efek negatif yang signifikan terhadap pekerjaan. Kenaikan upah minimum menyebabkan penurunan dalam pekerjaan pekerja muda. Kenaikan upah minimum memiliki efek negatif pada lapangan kerja kaum muda, tetapi kenaikan upah minimum

yang diperkenalkan oleh masing-masing negara bagian tidak memiliki dampak terhadap lapangan kerja.

Emre Aksoy (2013) meneliti tentang hubungan antara ketenagakerjaan dan pertumbuhan dari perspektif industri dengan mempertimbangkan insentif ketenagakerjaan: kasus Turki periode tahun 1988-2010. Penelitian ini menggunakan metode *root unit* dan kausalitas *granger*. Berdasarkan penelitian tersebut, menunjukkan bahwa hubungan antara pertumbuhan dan pekerjaan bervariasi dengan industri. Mencakup sepuluh industri dan ada kausalitas yang terdeteksi untuk empat industri. Enam industri yang dcakup dalam penelitian ini, tidak ada hubungan sebab akibat yang diperoleh. Undang-Undang Nomor 5084 memiliki pengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap industri, sosial, manufaktur, dan transportasi serta industri komunikasi 5763 diekstraksi pengaruh positif dan signifikan pada produksi dan distribusi energi, dan industri intermediasi keuangan.

J.J. McCall (2016) meneliti tentang ekonomi informasi dan cari kerja. Penelitian ini menggunakan metode model sederhana dan umum pencarian pekerjaan serta pencarian adaptif. Berdasarkan penelitian tersebut, menunjukkan bahwa periode pencarian aktual yang diharapkan, lebih besar dan diantisipasi oleh pencari kerja yang terlalu optimis. Periode pencarian yang diharapkan melebihi periode pencarian yang diharapkan jika pencari tahu distribusi yang sebenarnya. Overoptimisme, pesimisme, perilaku nonadaptif mengarah ke pengangguran yang terlalu lama. Seorang pencari di pasar tenaga kerja tidak hanya peduli dengan tingkat upah, tetapi juga dengan periode kerja

yang diantisipasi. Semakin lama masa kerja, semakin baik peluang kerja. Pencari kerja sering memiliki pengetahuan yang tidak memadai tentang distribusi upah yang sesuai dengan keahliannya.

C. Hipotesis

Penelitian ini mengajukan beberapa hipotesis, yaitu:

1. Diduga upah minimum kabupaten berhubungan negatif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.
2. Diduga inflasi berhubungan negatif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.
3. Diduga produk domestik regional bruto berhubungan positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.
4. Diduga angkatan kerja berhubungan positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.

D. Model Penelitian

Salah satu bentuk struktur data yang sering digunakan dalam studi ekonometrika adalah data panel. Data panel adalah data yang bersruktur urut waktu sekaligus *cross section* (Ariefianto, 2012). Hasil estimasi dengan model *random effect* dengan menggunakan *software Eviews 10.0* memperlihatkan nilai koefisien determinasi (R^2) pada model regresi dengan variabel dependen penyerapan tenaga kerja. Hasil dari hasil koefisien determinasi dalam bentuk persen variabel dependen penyerapan tenaga kerja dapat dijelaskan oleh empat variabel independen, yaitu upah minimum kabupaten (UMK), inflasi, produk domestik regional bruto (PDRB), dan angkatan kerja.

Setelah melewati uji Chow dan uji Hausman, maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = C + UMK + INFLS + PDRB + AK$$

Berdasarkan persamaan di atas serta hasil regresi data panel, maka hasil penelitian ini pada model regresi menjelaskan bahwa faktor upah minimum kabupaten berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja pada derajat kepercayaan $\alpha=5\%$. Hasil ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Rochmani dkk (2016) yang meneliti tentang penyerapan tenaga kerja sektor industri di Provinsi Jawa Tengah. Pada model regresi juga menjelaskan bahwa faktor inflasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Faktor produk domestik regional bruto berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Hasil dari faktor inflasi dan produk domestik regional bruto sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Sitompul (2014) yang meneliti tentang penyerapan tenaga kerja sektor industri di Sumatera Utara. Faktor angkatan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja pada derajat kepercayaan $\alpha=5\%$. Hasil ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Tri (2017) yang meneliti tentang determinan penyerapan tenaga kerja di Indonesia.